

## Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia

Reza Rizki Ramadhan<sup>1\*</sup>, Yaya Setiadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Statistika, Politeknik Statistika STIS, Indonesia

\* Email Penulis Korespondensi: 15.8847@stis.ac.id

Info Artikel: Diterima: 2019-10-15; Disetujui: 2019-12-16; Dipublikasi: 2019-12-26

**Abstract:** Economic growth figures are one indicator to assess economic success. During the period of 2011-2017, Indonesia's economic growth rate was quite good, with an average of 5,4 percent per year. However, these conditions have not been matched by a significant reduction in the level of poverty and inequality, and the level of employment has not been optimized. This indicates that the growth that has occurred has not been inclusive. This study to find out how the level of inclusive growth in Indonesia, measured by the inclusiveness index and the factors of development of physical capital and human resources that influence. The method of this study use panel data regression approach. The findings show that in the period 2011-2017, the level of inclusiveness index value in Indonesia is in the middle category. The variable of physical capital development in the form of government capital expenditure is statistically significant influencing the inclusiveness index in Indonesia, while the value of private capital investment has no significant effect. Human resource development variables, in the form of LFPR, RLS, and health complaints were statistically significant for the inclusiveness index in Indonesia, while government spending on education and health not significantly affected the inclusiveness index in Indonesia.

**Keywords:** inclusive index, physical development, human resources, panel data.

**JEL Classification:** O15, O150

---

### How to Cite:

Ramadhan, R. R. & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2): 109-124. DOI: <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797>.

---

### 1. PENDAHULUAN

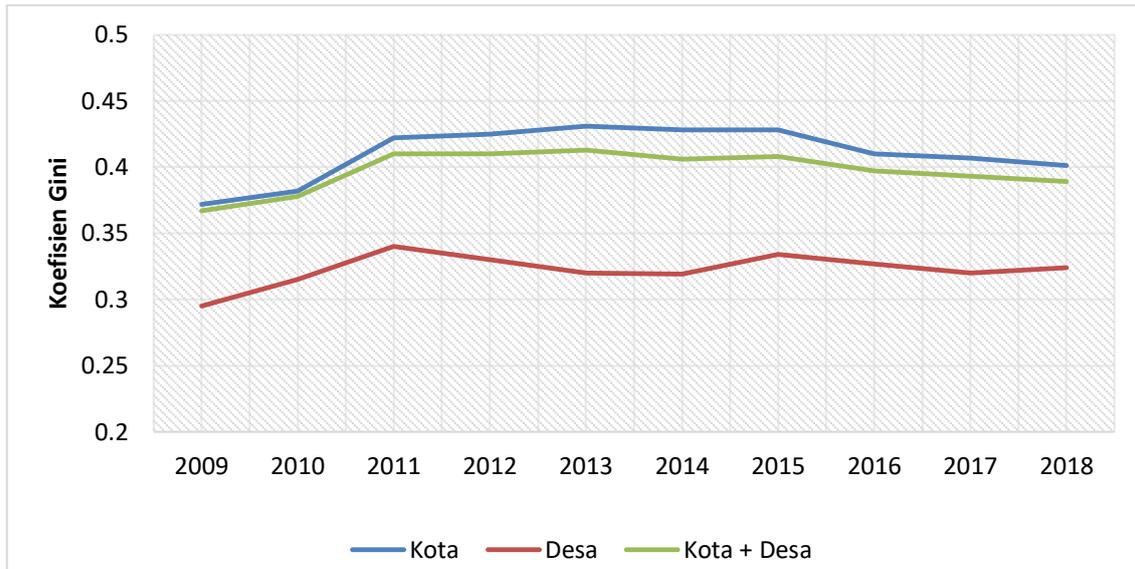
Hingga saat ini, angka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dinilai penting dan strategis untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Angka pertumbuhan ekonomi diukur dari perkembangan nilai tambah *output* barang dan jasa yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa nilai pendapatan riil nasional juga meningkat (Sukirno, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi fokus dan tujuan pembangunan negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya semenjak krisis moneter pada tahun 1998 lalu menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di Indonesia terus berkembang. Akan tetapi, pertumbuhan perekonomian yang terjadi dikhawatirkan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berada pada level bawah.

Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup baik dengan rata-rata perekonomian tumbuh sebesar 5,4 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir, jika dibandingkan dengan negara lain yang juga merupakan anggota G20, pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dikatakan bertahan dengan baik (Kemenkeu, 2017). Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama ini dinilai belum mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya, pembangunan ekonomi yang diharapkan tidak hanya semata-mata dinilai dari tingginya pencapaian angka pertumbuhan tapi juga dari aspek kesejahteraan masyarakat secara luas (Sholihah, 2014). Apalagi untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan hanya dengan memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi, karena perhitungannya yang hanya didasarkan pada perubahan nilai *output* (PDB) antar periode.

Pertumbuhan inklusif menurut Ramos *et al* (2013) didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan *output* sebagai tujuan akhir tetapi lebih mengutamakan pada dampak pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu peningkatan kesempatan kerja dan dapat memaksimalkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (dimensi *participation*) sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan (dimensi *benefit sharing*). Konsep inilah yang dinilai lebih tepat digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan perekonomian terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif sebagai salah satu target pada RPJMN 2015-2019 sekaligus mendukung tercapainya poin kedelapan dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang layak bagi semua (UNDP, 2017). Selain itu *Asian Development Bank* (ADB) juga menetapkan pembangunan ekonomi inklusif sebagai salah satu dari tiga pilar utama dalam kerangka strategis jangka panjang 2020 ADB.

Semenjak memasuki era reformasi, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penurunan kemiskinan di Indonesia cenderung melambat, penurunan cukup besar hanya terjadi pada 2010-2012, sementara pada periode selanjutnya meskipun tetap menurun, angka kemiskinan yang dicapai tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Afandi (2017) dalam penelitiannya dengan menggunakan data kemiskinan, investasi, pertumbuhan ekonomi, koefisien gini, dan inflasi di Indonesia yang bersumber dari BPS, Bappenas dan *World Bank* periode 1981-2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.



**Gambar 1.** Perkembangan Koefisien Gini di Indonesia 2009-2018

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS)

Selain permasalahan kemiskinan, tingkat ketimpangan yang tinggi juga menjadi permasalahan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini yang dapat terindikasi dari nilai koefisien gini. Koefisien gini (*gini ratio*) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah dengan menghitung rasio kurva Lorenz dengan keseluruhan areanya (Todaro & Smith, 2012). Berdasarkan Gambar 1 di atas tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur melalui nilai koefisien gini belum menunjukkan hal yang cukup menggembirakan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 nilai koefisien gini Indonesia cenderung stagnan berkisar pada angka 0,35-0,40. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diduga masih memberikan dampak negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Kuznets dalam Todaro & Smith (2012) yang mengatakan bahwa terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan, di mana pada masa awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh terjadinya ketimpangan pendapatan antar penduduk. Jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, angkanya berada pada tingkatan 5 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja yang terjadi, nilainya masih lebih besar dibandingkan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan pada periode 2011-2017 secara rata-rata pertumbuhan jumlah angkatan kerja mencapai 1,56 persen sedangkan penurunan angka pengangguran terbuka di Indonesia pada periode yang sama secara rata-rata hanya turun sebesar 0,27 persen. Hal ini dapat memunculkan dugaan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harusnya dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada dengan memaksimalkan partisipasi angkatan kerja secara merata, konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mensyaratkan adanya kesetaraan kesempatan antar etnis, wilayah maupun gender (Klasen, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, stabilnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada angka 5 persen per tahun, tidak serta merta membuat Indonesia terbebas dari permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja yang merupakan dimensi penting dalam konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penurunan kemiskinan yang masih lambat, tingkat ketimpangan pendapatan yang cenderung bertahan pada tingkat menengah, serta partisipasi angkatan kerja yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi penghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui bagaimana tingkatan inklusivitas perekonomian di Indonesia dengan menggunakan indeks inklusivitas yang dirumuskan oleh Ramos, Ranieri & Lammens (2013).

Walaupun bukan merupakan isu baru, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga saat ini semakin mendapatkan perhatian dan dianggap penting, dalam pertemuan tahunan IMF yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2018 lalu, isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu topik yang diangkat. Berbagai indikator untuk mengukur pertumbuhan inklusif hingga saat ini pun terus dikembangkan untuk memperoleh metode yang tepat dalam pengukuran pertumbuhan yang inklusif. Apa yang menjadi faktor pendorong dari inklusivitas perekonomian itu pun masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab, terutama jika dikaitkan dengan fokus pemerintah Indonesia saat ini pada pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Pemerintah terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas baik secara regional maupun nasional melalui peningkatan nilai investasi dengan meregulasi ulang berbagai aturan yang dinilai menghambat, membangun infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal, serta terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut telah tertuang dalam agenda prioritas dan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan iklim investasi di Indonesia, hal ini diindikasikan dengan peningkatan yang cukup signifikan pada nilai indeks kemudahan berusaha atau *doing business index* yang dikeluarkan Bank Dunia, iklim investasi di Indonesia menunjukkan perbaikan dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi 72 pada tahun 2017 (*World Bank*, 2018). Iklim investasi yang positif diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi swasta dari luar maupun dalam negeri.

Selain dari aspek penanaman modal fisik, pembangunan modal sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam mendorong perekonomian yang kuat. Pembangunan sumber daya manusia dapat tercermin dari nilai modal manusia yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, investasi dalam pembangunan sumber daya manusia juga dapat diambil peran oleh pemerintah melalui alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang dipadukan dengan partisipasi angkatan kerja yang optimal diharapkan dapat mampu meningkatkan perekonomian secara umum.

Peningkatan penanaman modal dan pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan yang dibuat, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Penelitian ini akan berfokus untuk melihat bagaimana pengaruh penanaman modal fisik melalui instrumen investasi dan pengeluaran pemerintah, serta pembangunan modal manusia yang tergambar dari nilai indikator pendidikan, kesehatan dan partisipasi

angkatan kerja terhadap nilai indeks inklusivitas perekonomian di Indonesia pada tahun 2011-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara umum tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk menganalisis gambaran inklusivitas perekonomian melalui nilai indeks inklusif di Indonesia pada tahun 2011-2017; (2) menganalisis gambaran pembangunan modal fisik dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia pada tahun 2011-2017; dan (3) menganalisis pengaruh penanaman modal fisik dan pembangunan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia pada tahun 2011-2017.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada penelitian ini mengadopsi definisi dari Ramos, Ranieri & Lammens (2013), Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan suatu proses yang mencakup dimensi *benefit-sharing* dan dimensi *participation* seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun untuk mengukur tingkat pertumbuhan yang inklusif didekati dengan perhitungan indeks inklusivitas untuk mengetahui bagaimana capaian dari suatu wilayah untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow (1988) dalam Todaro & Smith (2012), pertumbuhan perekonomian akan dipengaruhi oleh persediaan modal, tenaga kerja, kualitas angkatan kerja dan kemajuan teknologi ataupun inovasi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai *output* perekonomian di suatu wilayah. Dengan kata lain, pembangunan modal fisik memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam membangun perekonomian, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif seperti ditemukan pada penelitian Raheem, Isah & Adedeji (2018). Pendidikan dan kesehatan dinilai sebagai komponen pembangunan sumber daya manusia yang cukup vital dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2012).

## 3. METODE

Penelitian ini mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia selama periode 2011-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inklusivitas perekonomian yang dicerminkan dari nilai indeks inklusif sebagai variabel dependen, serta sebagai variabel independen antara lain: nilai investasi swasta berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), belanja modal pemerintah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), rata-rata lama sekolah (RLS), belanja pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan serta persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan sebagai variabel independen.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis analisis statistik, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif yang digunakan berupa tampilan grafik serta peta tematik untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tingkat inklusivitas perekonomian di wilayah Indonesia yang dilihat melalui nilai indeks inklusif per provinsi, beserta bagaimana perkembangan pembangunan modal fisik dan sumber daya manusia

di Indonesia. Indeks Inklusivitas (II) merupakan rata-rata sederhana ketiga indikator, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan partisipasi angkatan kerja. Ketiga indikator tersebut diberi bobot yang sama. Nilai indeks berkisar dari 0 sampai 1 dengan nilai-nilai yang lebih rendah mewakili kinerja yang lebih baik. Semakin kecil nilai indeks, semakin rendah tingkat kemiskinan dan ketimpangan, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja semakin tinggi, atau dengan kata lain dapat dikatakan pertumbuhan yang terjadi semakin inklusif. Perhitungan komponen Indeks Inklusif (II) dihitung dengan rumus normalisasi *min-max* ketiga komponen inklusivitas perekonomian (Ranieri & Ramos, 2013). Rumus untuk normalisasi *min-max* untuk komponen tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Z_i = \frac{X_i - \text{Min}(X_i)}{\text{Max}(X_i) - \text{Min}(X_i)} \quad (1)$$

Dimana:  $Z_i$  = nilai normalisasi;  $Z_i$  = nilai normalisasi;  $X_i$  = nilai observasi;  $\text{Max}(X_i)$  = nilai terbesar dalam data observasi;  $\text{Min}(X_i)$  = nilai terkecil dalam data observasi. Sedangkan rumus untuk normalisasi *min-max* untuk komponen tingkat penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

$$Z_i = - \frac{X_i - \text{Min}(X_i)}{\text{Max}(X_i) - \text{Min}(X_i)} + 1 \quad (2)$$

Dimana:  $Z_i$  = nilai normalisasi;  $X_i$  = nilai observasi;  $\text{Max}(X_i)$  = nilai terbesar dalam data observasi;  $\text{Min}(X_i)$  = nilai terkecil dalam data observasi. Selanjutnya, nilai indeks inklusif akan dihitung dengan rumus rata-rata sederhana sebagai berikut:

$$II = \frac{1}{3}(Z \text{ kemiskinan} + Z \text{ ketimpangan} + Z \text{ penyerapan TK}) \quad (3)$$

Dimana:  $Z \text{ kemiskinan}$  merupakan nilai normalisasi komponen kemiskinan  $Z \text{ ketimpangan}$  adalah nilai normalisasi komponen ketimpangan  $Z \text{ penyerapan TK}$  nilai normalisasi komponen penyerapan tenaga kerja. Adapun klasifikasi indeks inklusif berdasarkan nilainya adalah sebagai berikut:

- 0,0 – 0,2 : tingkat inklusivitas perekonomian sangat tinggi
- 0,2 – 0,4 : tingkat inklusivitas perekonomian tinggi
- 0,4 – 0,6 : tingkat inklusivitas perekonomian menengah
- 0,6 – 0,8 : tingkat inklusivitas perekonomian rendah
- 0,8 – 1,0 : tingkat inklusivitas perekonomian sangat rendah

Analisis inferensial yang digunakan untuk melihat pengaruh pembangunan modal fisik dan sumber daya manusia yang tercermin dalam variabel-variabel penanaman modal swasta berupa PMA dan PMDN, belanja pemerintah fungsi kesehatan dan pendidikan, belanja modal pemerintah, TPAK, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan persentase masyarakat dengan keluhan kesehatan terhadap tingkat inklusivitas perekonomian di Indonesia yang didekati dengan nilai indeks inklusif per provinsi adalah dengan menggunakan regresi linear berganda data panel. Tahapan dalam melakukan analisis regresi data panel menurut Gujarati & Porter (2008) yaitu sebagai berikut: pertama menentukan spesifikasi model yang akan digunakan, kemudian melakukan pemilihan model yang terbaik di antara *common effect*, *fixed effect* dan *random effect model* dengan melakukan uji Chow, Hausman dan BP-LM. Setelah diketahui model dan metode estimasi yang paling cocok, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik terhadap

model yang diperoleh tersebut. Apabila hasil uji asumsi terpenuhi maka dapat dilanjutkan ke tahapan pengujian keberartian model dan interpretasi hasil yang diperoleh. Untuk melakukan proses perhitungan dan analisis dibantu dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan Eviews 9.0. Adapun model regresi linear berganda data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

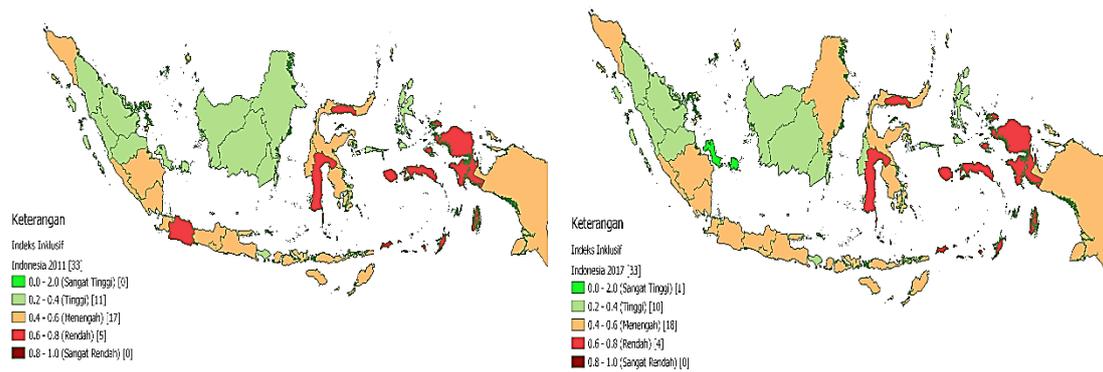
$$I_{i,t} = \alpha + \beta_1 \ln(INV_{i,t}) + \beta_2 \ln(Pemerintah_{i,t}) + \beta_3 \ln(Pendkes_{i,t}) + \beta_4 RLS_{i,t} + \beta_5 TPAK_{i,t} + \beta_6 Keluhansehat_{i,t} + u_{i,t} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana  $I$  adalah indeks inklusif;  $INV$  adalah nilai penanaman modal asing dan dalam negeri;  $Pemerintah$  adalah nilai belanja modal pemerintah;  $Pendkes$  adalah nilai belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan;  $RLS$  adalah rata-rata lama sekolah;  $TPAK$  adalah tingkat partisipasi angkatan kerja; dan  $Keluhan\ sehat$  adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan terakhir.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

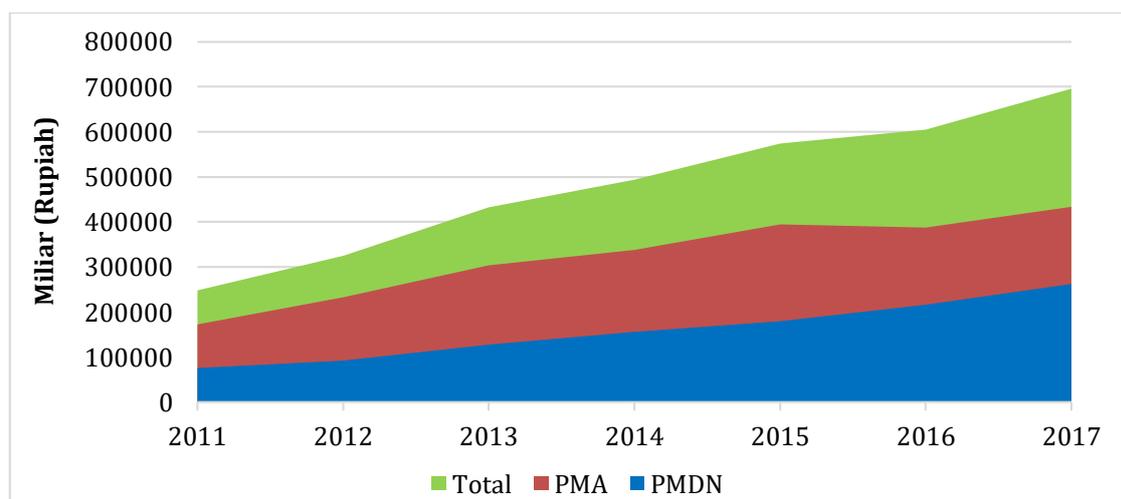
Pada periode 2011 hingga 2017 berdasarkan pada klasifikasi indeks inklusif yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, secara umum tingkat inklusivitas perekonomian di wilayah Indonesia berada pada tingkat menengah. Pada tahun 2011, tingkat inklusivitas perekonomian pada sebagian besar Provinsi di Indonesia berada pada tingkat menengah. Seperti terlihat pada Gambar 2, terdapat sebanyak 17 provinsi yang tingkatan indeks inklusifnya masuk pada kategori menengah. Sementara capaian positif dengan nilai indeks inklusif yang tinggi baru dapat dicapai oleh 11 Provinsi, yang kebanyakan berada di wilayah Sumatera, seluruh Kalimantan dan Maluku Utara. Masih terdapat 5 provinsi yang berada pada tingkat rendah, yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 2011 belum sepenuhnya inklusif.

Pada tahun 2017, tingkat inklusivitas perekonomian masih belum jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2011. Secara umum tingkat indeks inklusif sebagian besar provinsi belum beranjak dari tingkatan menengah (lihat Gambar 2). Peningkatan capaian yang meningkat dialami oleh Provinsi Jawa Barat, yang tidak lagi berada pada tingkatan yang rendah, Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami peningkatan nilai indeks inklusif menjadi masuk kategori tinggi, dibandingkan tahun 2011 yang masih termasuk menengah, selain itu Provinsi Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi yang dapat mencapai tingkatan indeks inklusif yang dikategorikan sangat tinggi. Sementara itu Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan tingkatan inklusivitas perekonomian pada 2017 dibandingkan dengan tahun 2011.



**Gambar 2.** Peta Sebaran Indeks Inklusif Provinsi di Indonesia tahun 2011 dan 2017  
**Sumber:** Badan Pusat Statistik, diolah

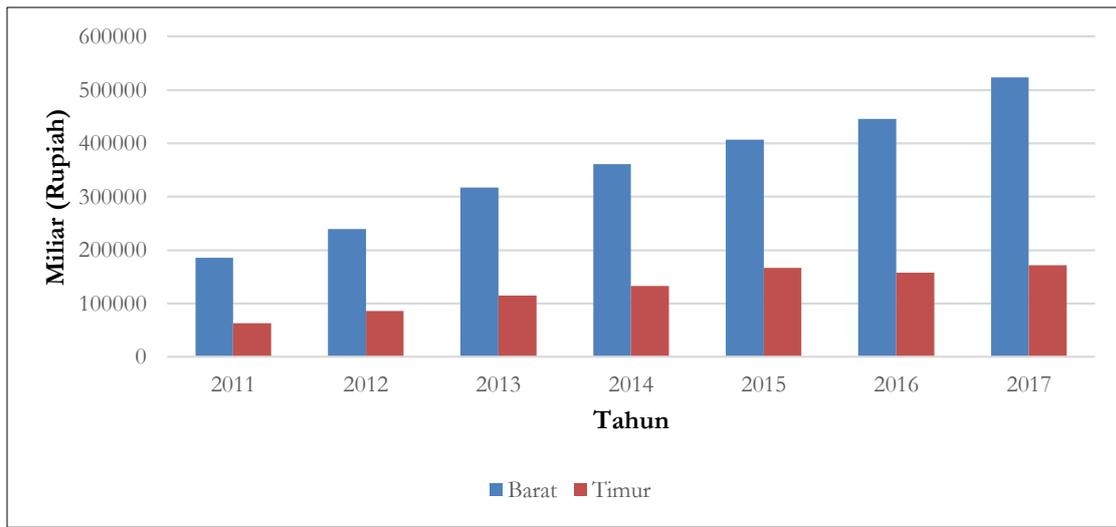
Berdasarkan perbandingan pada Gambar 2 di atas, memang tidak terlalu banyak perubahan pada tingkat inklusivitas perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia pada periode 2011 dan 2017. Sebagian besar tetap pada posisinya, dan hanya sedikit saja yang mengalami perubahan. Jika dilihat per wilayah, di wilayah Indonesia Timur khususnya perlu mendapat perhatian karena sebagian besar wilayahnya masih memiliki tingkatan indeks inklusif yang menengah dan rendah, hanya Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat yang termasuk pada kategori tinggi capaian nilai indeks inklusifnya. Kemudian jika melihat wilayah Pulau Jawa juga ternyata tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, sebagai pulau dengan kegiatan perekonomian yang dinilai paling aktif, nyatanya seluruh provinsi di Pulau Jawa baru masuk pada tingkatan inklusivitas perekonomian yang menengah saja, dan belum mampu mencapai capaian yang tinggi dalam proses penurunan kemiskinan, ketimpangan dan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.



**Gambar 3.** Realisasi PMA dan PMDN (Miliar Rupiah), 2011-2017  
**Sumber:** Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Pada periode 2011 hingga 2017, perkembangan nilai investasi swasta di Indonesia baik investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan perkembangan yang positif, secara umum baik

investasi yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri secara umum terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total nilai investasi swasta di Indonesia adalah sebesar 248,829 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan nilai hingga akhirnya pada tahun 2017 mencapai sebesar 695,818 triliun rupiah. Pertumbuhan yang cukup besar pada nilai investasi swasta terjadi pada tahun 2012 dan 2013 di mana pada saat itu peningkatan nilai investasi swasta meningkat sebesar 31 persen dan 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun kemudian cenderung mengalami perlambatan hingga tahun 2017.



**Gambar 4.** Realisasi Penanaman Modal Swasta Menurut Wilayah Barat dan Timur, 2011-2017 (Miliar Rupiah)

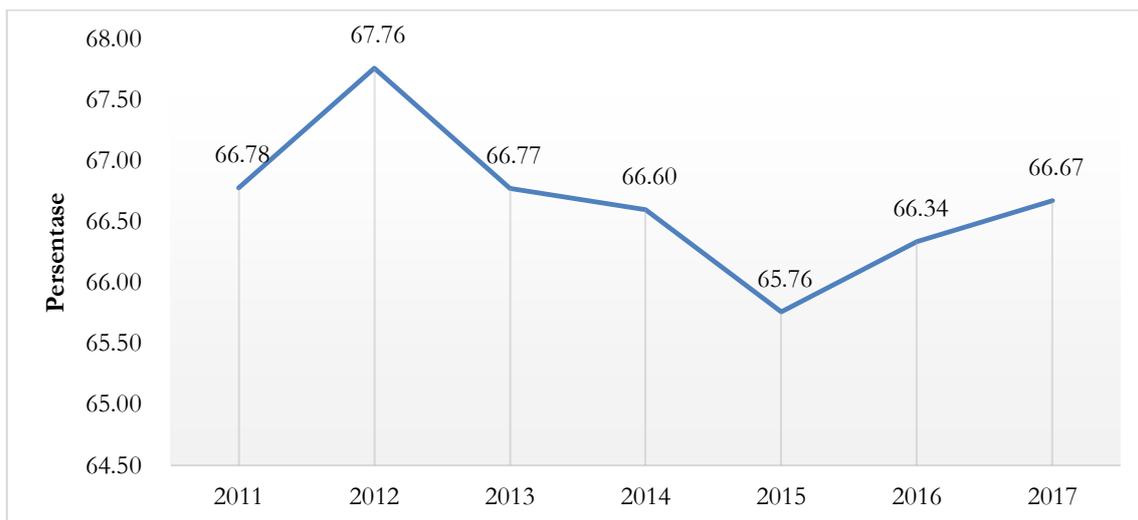
**Sumber:** Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Apabila dilihat dari proporsinya sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari Gambar 3 dari tahun 2011-2017, nilai investasi luar negeri selalu lebih besar dibandingkan nilai investasi yang berasal dari dalam negeri, kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa Indonesia lumayan dapat menarik perhatian dari investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara jika dilihat dari wilayahnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, nilai investasi swasta masih lebih besar nilainya di wilayah Indonesia bagian barat utamanya di Pulau Jawa, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara rata-rata pada tahun 2011-2017 nilai investasi swasta di Pulau Jawa mencapai 56 persen dari total investasi swasta di Indonesia, sementara keseluruhan wilayah Indonesia Barat mencapai 73 persen. Meskipun demikian, terjadi tren penurunan pada proporsi nilai investasi di Pulau Jawa pada periode 2011-2017, hal ini dapat menunjukkan bahwa daerah lain di luar Pulau Jawa mulai dapat menumbuhkan daya saingnya agar lebih dapat meningkatkan nilai penanaman modal di wilayahnya.

Belanja modal pemerintah Indonesia secara umum mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 2011-2017. Terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu pada tahun 2013, 2015 dan 2017 di mana tingkat pertumbuhannya mendapat lebih dari 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai realisasi belanja modal pemerintah ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah terus melakukan pembangunan di daerahnya. Tingkat pertumbuhan belanja modal pemerintah provinsi pada periode 2011-2017

mengalami pola yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah provinsi dalam alokasi belanja modal masih sangat minim dan terbatas sehingga tidak dapat terus tumbuh positif pada setiap tahunnya.

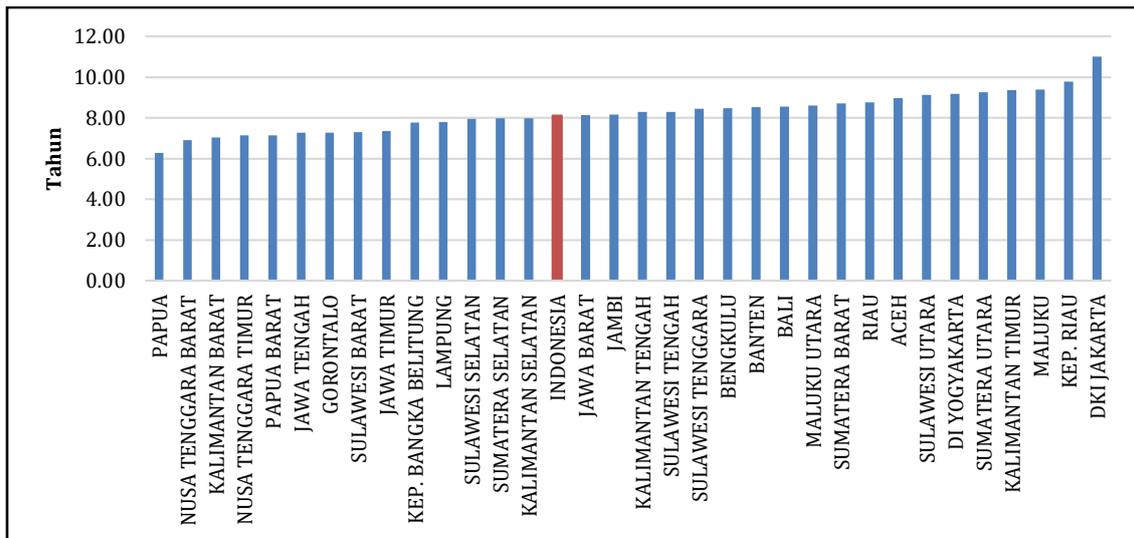
Belanja pemerintah provinsi di Indonesia untuk fungsi pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi yang berasal dari pemerintah yang berperan pada pembangunan modal manusia di suatu wilayah. Pembangunan modal manusia ini kemudian diharapkan akan memberikan efek positif terhadap perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan nilai realisasi total belanja untuk fungsi pendidikan dan kesehatan pada 33 provinsi di Indonesia pada periode 2011-2017 menunjukkan *trend* yang cukup positif, keduanya mengalami peningkatan nilai setiap tahunnya, peningkatan yang terus menerus menjadi indikasi bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu fokus pembangunan dari pemerintah. Pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang vital dalam proses pembangunan manusia, oleh karenanya hal ini perlu terus ditingkatkan. Melalui pengeluaran pemerintah yang tepat dalam alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, diharapkan realisasi belanja tersebut akan mampu mengatasi kesenjangan antar wilayah dan kemudian dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



**Gambar 5.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia, 2011-2017

**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Penyerapan tenaga kerja yang maksimal akan terjadi apabila diimbangi dengan partisipasi seluruh masyarakat pada kegiatan perekonomian, semakin banyak masyarakat yang aktif secara ekonomi, maka menunjukkan bahwa perekonomian di suatu wilayah berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), menunjukkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja, atau dengan kata lain terlibat dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Secara nasional pada periode 2011-2017 TPAK di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuatif seperti terlihat pada Gambar 5 di atas.



**Gambar 6.** Rata-rata Lama Sekolah Provinsi di Indonesia, 2017

**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan maka semakin banyak ilmu yang ia serap dan dapat digunakan untuk membantu kehidupannya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum, rata-rata lama sekolah di Indonesia dari tahun 2011-2017 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu jika dilihat dari sebaran wilayahnya, pada tahun 2017 provinsi dengan angka RLS tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,02 tahun dan yang paling rendah adalah Provinsi Papua yang hanya mencapai 6,27 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia. Meskipun pola pembagian wilayahnya tidak terlalu terlihat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan antar wilayah terutama wilayah barat dan timur masih terjadi.

Peningkatan kesehatan masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk dicapai oleh pemerintah, agar mewujudkan sumber daya manusia yang dapat aktif dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam perekonomian. Semakin banyak masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan di suatu wilayah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak sehat. Oleh karenanya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menjadi salah satu indikator kesehatan yang cukup penting. Masyarakat yang sehat diharapkan dapat lebih produktif sehingga dapat berpartisipasi penuh dan memberikan dampak pada jalannya proses perekonomian di wilayahnya.

Analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel pembangunan modal fisik dan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia tahun 2011-2017. Terdapat tiga model estimasi yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *random effect* dan *fixed effect*. Berdasarkan hasil dari uji *Chow* didapatkan keputusan menolak  $H_0$  pada tingkat signifikansi 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect*. Kemudian dilanjutkan dengan uji *Hausman* yang memberikan keputusan gagal menolak  $H_0$  pada tingkat signifikansi 5 persen

sehingga dapat disimpulkan bahwa model *random effect* merupakan metode estimasi yang lebih baik. Sehingga pada kasus penelitian ini, model yang terbaik adalah model *random effect*.

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan, model terbaik yang terpilih adalah *random effect model*, maka pengujian asumsi yang perlu dilakukan yaitu uji normalitas dan nonmultikolinearitas, karena estimasi pada model *random effect* menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)* yang telah mengakomodasi permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian asumsi normalitas dengan menggunakan statistik uji Jarque-Bera memberikan nilai *p-value* sebesar 0,4835, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah gagal tolak  $H_0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual yang dihasilkan mengikuti distribusi normal. Untuk menguji asumsi nonmultikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk seluruh variabel independen hasilnya tidak ada yang menghasilkan nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi nonmultikolinearitas terpenuhi pada model ini.

Untuk melihat keberartian model dilakukan pengujian secara bersama-sama (simultan) yang dilihat dari nilai uji F simultan memberikan keputusan menolak  $H_0$  pada tingkat signifikansi 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya yaitu indeks inklusif pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2011-2017. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang mewakili pembangunan fisik yaitu investasi modal swasta secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks inklusif, namun belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu variabel yang mewakili pembangunan modal manusia yaitu pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi indeks inklusif, sementara TPAK, RLS, dan keluhan kesehatan secara statistik signifikan mempengaruhi indeks inklusif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai *adjusted R-squared* yang dihasilkan sebesar 22,5 persen menunjukkan bahwa hanya sebanyak 22,5 persen variasi dari indeks inklusif pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh variabel pembangunan modal fisik dan pembangunan sumber daya manusia pada penelitian ini.

Adapun hasil estimasi regresi linear berganda data panel dengan model *random effect* yang kemudian terpilih untuk mengetahui pengaruh pembangunan fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{I}_{i,t} = 0,9336 - 0,0019Ln(INV_{i,t}) + 0,0317Ln(Pemerintah_{i,t}^*) - 0,0031Ln(Pendkes_{i,t}) - 0,0116RLS_{i,t}^* - 0,0465TPAK_{i,t}^* + 0,004KeluhanSehat_{i,t}^*$$

Keterangan: \*) Signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen

Berdasarkan hasil estimasi, pembangunan fisik suatu wilayah yang diukur melalui variabel penanaman modal swasta dari asing maupun dalam negeri dan belanja modal pemerintah memberikan hasil yang berbeda. Penanaman modal swasta asing dan dalam negeri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks inklusif perekonomian 33 provinsi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih besarnya kontribusi investasi swasta pada sektor industri yang justru kurang dapat menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja kelas menengah ke bawah. Koefisiennya sendiri memiliki tanda

negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara penanaman modal dengan indeks inklusif. Semakin tinggi nilai penanaman modal di suatu wilayah maka akan semakin kecil nilai indeks inklusif pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut atau dengan kata lain pembangunan ekonomi di wilayah tersebut semakin inklusif.

Sementara itu belanja modal pemerintah memberikan hasil yang bertolak belakang dengan penanaman modal swasta, koefisiennya bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai indeks inklusif pertumbuhan ekonomi 33 provinsi di Indonesia. Tanda positif pada koefisien yang diperoleh menunjukkan bahwa jika belanja modal pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen maka nilai indeks inklusif pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, meningkat sebesar 0,031 poin dengan asumsi variabel lain konstan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin tidak inklusif. Hal ini tidak sesuai harapan, karena belanja modal pemerintah diharapkan akan meningkatkan nilai perekonomian masyarakat di suatu daerah, sehingga diharapkan belanja modal pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan dan meningkatkan partisipasi kerja masyarakat di suatu wilayah, namun hal tersebut belum terjadi di Indonesia karena nilai belanja modal pemerintah terutama pemerintah daerah dinilai masih minim nilainya dan pertumbuhannya belum konsisten setiap tahunnya, seperti yang ditemukan pada hasil penelitian Pangestu (2018) dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian provinsi di Indonesia dibandingkan dengan investasi pemerintah melalui belanja modal.

Sementara dilihat dari aspek pembangunan sumber daya manusia, dapat dilihat bahwa variabel ketenagakerjaan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja secara statistik berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusivitas 33 provinsi di Indonesia, dengan koefisien yang diperoleh sebesar -0,011 yang memberikan informasi bahwa setiap kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1 persen akan menurunkan nilai indeks inklusivitas perekonomian sebesar 0.011 poin dengan asumsi variabel lain konstan.

Kemudian dilihat dari sisi pendidikan sebagai salah satu upaya pembangunan modal manusia agar menjadi lebih produktif sehingga dengan produktivitas yang tinggi tersebut maka pemenuhan kebutuhan hidup akan tercukupi dan dapat meningkatkan peluang untuk keluar dari kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi, rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh secara signifikan terhadap inklusivitas perekonomian 33 provinsi di Indonesia. Koefisien yang dihasilkan bertanda negatif menunjukkan semakin tinggi nilai rata-rata lama sekolah pada suatu wilayah, maka semakin rendah nilai indeks inklusifnya atau pembangunan ekonomi di wilayah tersebut semakin inklusif. Ketika rata-rata lama sekolah meningkat 1 poin maka nilai indeks inklusif akan turun sebesar 0,046 poin dengan asumsi variabel lain konstan.

Sementara dari sisi kesehatan yang dicerminkan melalui nilai persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan, secara statistik signifikan mempengaruhi indeks inklusif perekonomian di Indonesia. Tanda positif pada koefisien menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan yang positif, semakin tinggi nilai persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan, maka semakin tinggi pula nilai indeks inklusifnya, yang mencerminkan semakin tidak inklusifnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Nilai koefisien sebesar 0,004 menunjukkan ketika persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan meningkat satu satuan maka nilai indeks inklusif akan

meningkat sebesar 0,004 poin dengan asumsi variabel lain konstan.

Sementara itu pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks inklusif pada 33 provinsi di Indonesia. Meski begitu, koefisien yang dihasilkan bertanda negatif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi nilai pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan maka pembangunan ekonomi di suatu wilayah akan semakin inklusif karena nilai indeks inklusif pertumbuhan ekonominya semakin kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kristyanto & Kaluge (2018) dan Raheem, Isah, & Adedeji (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan investasi modal manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan nilai indeks inklusif yang dirumuskan oleh Ramos dan Ranieri, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkatan indeks inklusif di Indonesia pada periode 2011-2017 secara umum tergolong pada tingkat menengah karena sebagian besar provinsi memiliki nilai indeks inklusif yang berada pada kategori menengah. Pembangunan modal fisik dan sumber daya manusia di Indonesia pada periode 2011-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang nilainya cenderung berubah ke arah yang lebih baik.

Variabel pembangunan modal fisik yang secara signifikan mempengaruhi indeks inklusif di Indonesia yaitu belanja modal pemerintah semakin tinggi nilainya membuat tingkat pertumbuhan ekonomi justru semakin tidak inklusif, sementara nilai investasi modal swasta tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel pembangunan sumber daya manusia yaitu TPAK, RLS, dan keluhan kesehatan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, TPAK dan RLS yang semakin tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin inklusif sedangkan keluhan kesehatan yang semakin tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin tidak inklusif. Sementara itu, belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusif pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lain dan memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pendukung analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks inklusif yang digunakan untuk mengukur inklusivitas perekonomian.

## REFERENSI

- Afandi, A., Dwi W., & Jaka S. (2017). Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 435-441.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. (2008). *Basic Econometrics 5th Ed*. New York: Mc Graw Hill International Edition.

- Kemenkeu. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Diakses pada tanggal 4 November 2018 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Klasen, S. (2010). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, (No. 12).
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 182-189.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Equality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28
- Pangestu, I. M. (2018). *Pengaruh Penanaman Modal dan Pembangunan Modal Manusia terhadap PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia tahun 2010-2016*. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- Raheem, I. D., Isah, K. O. & Adedeji, A. A. (2018) Inclusive growth, human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29-48. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10644016-9193-y>
- Ranieri R., & Ramos, R. A. (2013). Inclusive Growth: Building a concept. *International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) Working Paper*, (No. 104).
- Ramos, R. A., Ranieri, R., & Lammens, J. W. (2013). Mapping Inclusive Growth. *International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) Working Paper*, (No. 105).
- Sholihah, D. H. A. (2014). *Pertumbuhan Inklusif: Faktor-Faktor yang memengaruhi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Solow, Robert M. (1988). Growth Theory and After. *The American Economic Review*, 78(3): 307-317.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*. (Edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Press
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (12<sup>th</sup> Edition). New Jersey: Pearson
- UNDP. (2017). *UNDP's Strategy for Inclusive and Sustainable Growth*. New York: UNDP
- World Bank. (2018). *Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs*. Washington: World Bank.

